

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Loano. Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Loano, penelitian ini memperoleh data sampel sejumlah 131 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Loano. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan dana desa dan perwujudan transparansi dapat membantu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik, berkualitas, dan transparan.
2. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Loano. Perangkat desa yang melaksanakan perannya dengan baik akan dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik pula

3. Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Loano. Adanya pemahaman perangkat desa yang baik terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik, berkualitas, dan transparan.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan, dimana hipotesis penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, peran dan pemahaman perangkat desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Walaupun demikian seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang tetap masih terjadi penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Loano, hal ini mungkin dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti masih rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa di Kecamatan Loano dimana sebagian besar memiliki pendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 66% dan masih ada yang berpendidikan terakhir SD dan SMP, ini memungkinkan sebagian besar perangkat desa belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan keuangan maupun pelaporan keuangan. Hal ini di dukung pula dengan jawaban perangkat desa yang sebagian besar menjawab tidak setuju pada pernyataan bahwa penyusunan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa dilakukan secara mandiri oleh perangkat desa. Tidak hanya itu, kantor desa di desa-desa Kecamatan Loano juga belum semua memiliki jaringan internet yang stabil sehingga hal ini juga akan menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban perangkat desa.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan walaupun peneliti telah mengupayakan sebaik mungkin dalam melakukan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan sebagai bahan analisis pada objek penelitian yang terbatas yaitu pada perangkat desa di Kecamatan Loano. Sehingga memungkinkan akan mendapatkan hasil maupun kesimpulan yang berbeda apabila penelitian dilakukan pada objek penelitian yang berbeda.
2. Adanya kesulitan dalam pengumpulan kembali kuesioner sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan serta terdapat 27 kuesioner yang tidak dikembalikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti desa kalikalong yang seluruh perangkat tidak dapat mengembalikan kuesioner dikarenakan adanya inspektorat dan banyak kesibukan lainnya, adapun perangkat desa lain yang sedang berada di luar kota maupun bekerja dari rumah.

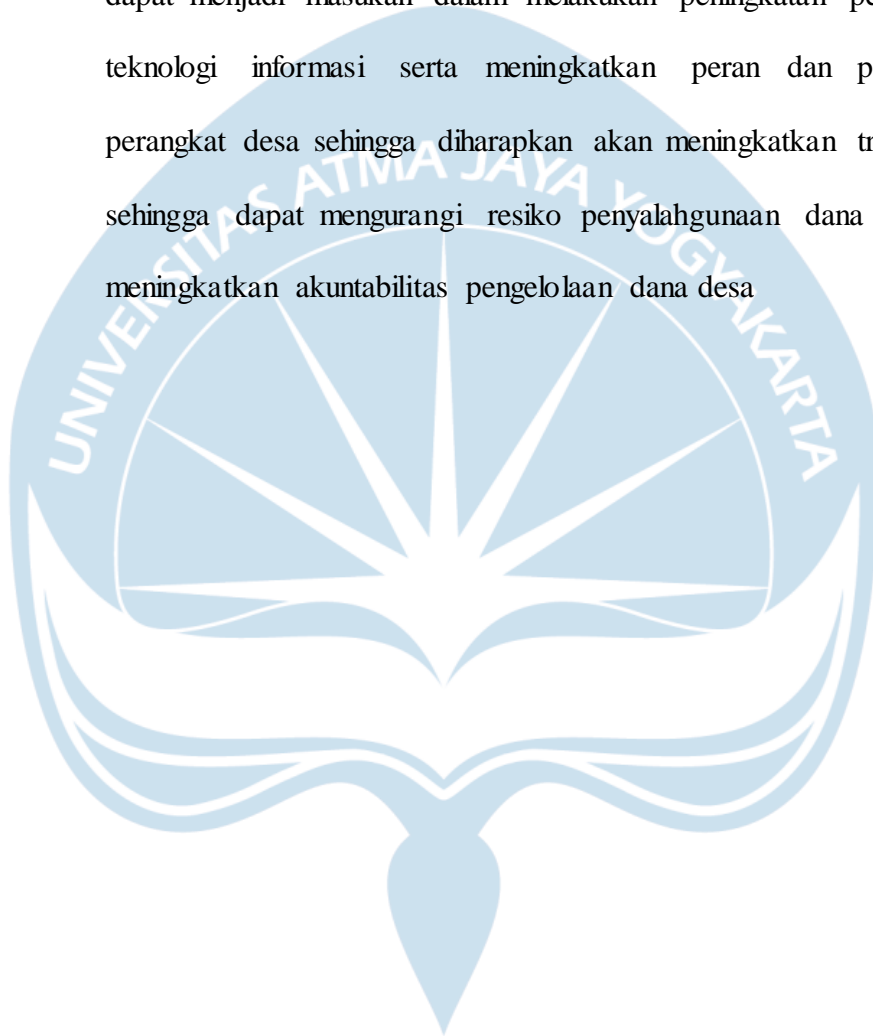
5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut.

1. Kepada penelitian selanjutnya yang sejenis dapat menambah variabel-variabel lain yang diperkirakan dapat berpengaruh secara signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta dapat mengambil sampel yang lebih banyak dari penelitian ini.

2. Menyarankan kepada pihak perangkat desa sekiranya penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi serta meningkatkan peran dan pemahaman perangkat desa sehingga diharapkan akan meningkatkan transparansi sehingga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan dana desa serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa



Daftar Pustaka

- Azhari. (2019). *Pengaruh Pemahaman dan Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Barat)*. Skripsi: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Baharudin. (2019, Juli 1). *Pengertian Desa*. Retrieved from JurnalDesa.id: <https://jurnalDesa.id/pengertian-desa/>
- BKT, R. K. (2021, Maret 31). *Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi*. Retrieved from kemenkeu.go.id: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- bpkp. (2022, Maret 30). *Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*. Retrieved from <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2451/Juklak-Bimkon-Kuangan-Desa.bpkp>
- BPPKPD. (2022, Februari 17). *Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Retrieved from BPPKAD: <https://www.bppkpd.id/peningkatan-kapasitas-perangkat-desa/?msclkid=851db68ca5a011ecac55845486fe4cea>
- Enterprise, J. (2010). *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Undip.
- _____. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Undip.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- _____. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- _____. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Humas. (2022, Februari 19). Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>
- IAI-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) Tahun 2015.
- Kurniawan, A. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur. *Dimensia*, (Vol 13, No 2, hal. 1-12).
- Lubis, M. F. (2020). *Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- _____. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 162-172. *Universitass Islam Batik Surakarta*
- Paripurna. (2019, Juli 16). *Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Idonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015.
- Prokomsetda. (2017, Mei 22). *Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. Retrieved from Prokomsetda: <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Rahma, A. (2020, Juni 15). *Liputan6*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4279463/joko-wi-kalau-ada-yang-bandel-ada-yang-niat-korupsi-silakan-gigit-dengan-keras>
- Rankin, M. (2018). *Contemporary Issues in Accounting Second Edition*. Australia: Jhon Wiley & Sons Australia.
- Rifqi. (2020, Juni 25). *RKA 2021, Kemendes Genjot Pengembangan Ekonomi Desa Hingga Desa Wisata*. Retrieved from <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3315/rka-2021-kemendes-genjot-pengembangan-ekonomi-desa-hingga-desa-wisata>
- Saputra, D. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bantul*. Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Simarmata, J., Romindo, Putra, S. H., Prasetyo, A., Siregar, M. N., Ardiana, D. P., . . . Jamaludin. (2020). *Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen*. Yayasan Kita Menulis.
- Sindu, I. G., & Paramartha, A. G. (2018). *Dasar Sistem Komputer*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SS, P. H. (2020). *Amandemen UUD 1945 Sebagai Hasil Dari Reformasi Hukum Untuk Menuju Good Governance*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (Ed.); 2nd ed.). Alfabeta. www.cvalfabeta.com

Suryana, E. (2022, Januari 17). Retrieved from tvonenews:
<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/23145-dugaan-korupsi-dana-desa-warga-kedungpoh-purworejo-segel-kantor-desa?page=all>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2)

Undang-Undang No 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yesinia, N. I., Yulianti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Riset*, (Vol 10, No 1, hal. 105-112). Jember: Universitas Muhammadiyah.

